

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Pendampingan desa telah menjadi salah satu pendekatan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur sosial dan ekonomi suatu negara, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengatasi kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena desa umumnya memiliki keterbatasan sumberdaya dan akses terhadap layanan yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, desa juga sering kaliterisolasi secara geografis, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kerentanan ekonomi dan sosial.

Buku ini akan membahas pengantar tentang pendampingan desa sebagai pendekatan dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, akan dijelaskan definisi dan prinsip dasar pendampingan desa. Selanjutnya, akan disorot berbagai model dan strategi pendampingan desa yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendampingan desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si.
Drs. Joko Mulyono, M.Si.

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan



PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Pendampingan desa telah menjadi salah satu pendekatan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur sosial dan ekonomi suatu negara, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengatasi kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena desa umumnya memiliki keterbatasan sumberdaya dan akses terhadap layanan yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, desa juga sering kaliterisolasi secara geografis, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kerentanan ekonomi dan sosial.

Buku ini akan membahas pengantar tentang pendampingan desa sebagai pendekatan dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, akan dijelaskan definisi dan prinsip dasar pendampingan desa. Selanjutnya, akan disorot berbagai model dan strategi pendampingan desa yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendampingan desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si.
Drs. Joko Mulyono, M.Si.

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan



PENDAMPINGAN
DAN PEMBERDAYAAN DESA
PARTISIPATIF

Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan

Akhmad Munif Mubarok, S.Sos., M.Si.

Drs. Joko Mulyono, M.Si.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA PARTISIPATIF

Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan

Penulis:

Akhmad Munif Mubarak, S.Sos., M.Si.

Drs. Joko Mulyono, M.Si.

ISBN:

Copyright © Februari, 2017

Ukuran: 15,5cm X 23cm; Hal: iv + 250

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cover: Rahardian Tegar Kusuma

Lay Out: Tim Layout DARASIA

Cetakan I, 2023

Diterbitkan pertama kali oleh penerbit **DARASIA**

Rembangan Hill Residence, blok K No. 24, Kelurahan Baratan, Patrang, Kabupaten Jember

Telepon 085745050033

Email: Darasia@gmail.com

Didistribusikan oleh penerbit **DARASIA**

Rembangan Hill Residence, blok K No. 24, Kelurahan Baratan, Patrang, Kabupaten Jember

Telepon 085745050033

Email: Darasia@gmail.com

DAFTAR **ISI**

DAFTAR ISI // iii

BAB SATU

Pendahuluan // 1

BAB DUA

Konsep dan Teori Pendampingan Desa // 13

BAB TIGA

Identifikasi Masalah Kemiskinan di Desa // 53

BAB EMPAT

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendampingan // 93

BAB LIMA

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa // 109

BAB ENAM

Penguatan Infrastruktur // 135

BAB TUJUH

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan // 145

BAB DELAPAN

Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat // 183

BAB SEMBILAN

Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pendampingan Desa // 223

DAFTAR PUSTAKA // 243

TENTANG PENULIS // 249



BAB SATU

Pendahuluan

PENGANTAR TENTANG PENDAMPINGAN DESA

Pendampingan desa telah menjadi salah satu pendekatan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur sosial dan ekonomi suatu negara, sering kali menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengatasi kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena desa umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap layanan yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, desa juga sering kali terisolasi secara geografis, menjadikan mereka lebih rentan terhadap kerentanan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, pendampingan desa sebagai suatu konsep yang melibatkan intervensi dan bantuan untuk membantu desa-desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan. Pendampingan desa bertujuan untuk memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada desa-desa dalam mengembangkan potensi mereka, memperkuat kapasitas lokal, dan merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan

BAB **DUA**

Konsep dan Teori Pendampingan Desa

Pendampingan desa adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pembinaan dan penguatan kapasitas masyarakat desa dengan tujuan mengelola potensi dan sumber daya yang ada agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan. Melalui pendampingan desa, masyarakat desa diberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk teknis, finansial, dan sosial, dengan melibatkan kerja sama kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

Proses pendampingan desa menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Desa-desa seringkali memiliki potensi dan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Oleh karena itu, pendampingan desa hadir sebagai strategi untuk memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas kepada masyarakat desa dalam mengelola potensi tersebut. Dalam konteks ini, pendampingan desa bukan hanya tentang memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa. Proses ini melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB **TIGA**

Identifikasi Masalah Kemiskinan di Desa

Pendampingan desa dalam pengentasan kemiskinan melibatkan upaya mendalam untuk mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah yang mendasari ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di tingkat lokal. Pemahaman yang mendalam tentang masalah kemiskinan di desa menjadi langkah awal yang krusial dalam merancang strategi dan intervensi yang efektif. Dalam artikel ini, kami akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap identifikasi masalah kemiskinan di desa dengan menggunakan pendekatan akademik. Kami akan melihat secara rinci tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengatasi kemiskinan, serta perspektif akademik yang relevan dalam memahami kompleksitas masalah tersebut.

Desa-desanya seringkali dihadapkan pada beragam tantangan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya akses ini menghambat pengembangan potensi dan mereduksi peluang bagi masyarakat desa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya lapangan kerja formal, dan minimnya akses terhadap modal usaha

BAB **EMPAT**

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendampingan

Perencanaan dan pelaksanaan program pendampingan merupakan langkah strategis dalam mengatasi kemiskinan di desa. Program pendampingan bertujuan untuk memberikan bantuan, dukungan, dan pengembangan kapasitas kepada masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam tulisan ini, akan dilakukan elaborasi secara komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pendampingan, dengan fokus pada pendekatan yang komprehensif dan metode yang tepat guna.

TAHAPAN PERENCANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN DESA

Perencanaan program pendampingan yang efektif melibatkan serangkaian tahap yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi program. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan program pendampingan:

1. Analisis Situasi

Tahap pertama dalam perencanaan program pendampingan adalah analisis situasi. Pada tahap ini, dilakukan penilaian

BAB LIMA

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Pemberdayaan ekonomi mengacu pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk memberikan masyarakat desa akses, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka secara mandiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif yang krusial, termasuk modal, lahan, teknologi, dan pasar. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi mereka secara efisien dan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dalam pemberdayaan ekonomi adalah peningkatan akses masyarakat desa terhadap sumber daya produktif yang dapat mendukung pengembangan usaha mereka. Modal usaha merupakan sumber daya krusial yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan, atau memperluas usaha di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha bagi masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembiayaan mikro, pemberdayaan koperasi, atau pengembangan lembaga keuangan inklusif yang mampu menyediakan pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

BAB **ENAM**

Penguatan Infrastruktur

Investasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Infrastruktur yang kuat dan memadai membantu memperkuat kapasitas ekonomi desa, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan.

Salah satu aspek penting dalam pengembangan infrastruktur adalah jaringan jalan yang baik. Jalan-jalan yang baik tidak hanya memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas antara desa dengan kota-kota atau pasar-pasar terdekat, tetapi juga mempermudah distribusi produk pertanian dan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas jalan desa, pemeliharaan rutin, dan pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa-desa terpencil sangat penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi desa.

Selain itu, penyediaan listrik yang stabil dan terjangkau juga merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan di desa. Listrik yang tersedia memungkinkan masyarakat desa untuk

memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola dan memanfaatkan infrastruktur secara berkelanjutan.

PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN DI DESA

Akses layanan kesehatan yang memadai merupakan hal yang krusial dalam pengentasan kemiskinan di desa. Masyarakat desa seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Keterbatasan fasilitas kesehatan, jarak yang jauh, dan kurangnya tenaga medis yang tersedia di desa merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks ini, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di desa menjadi sangat penting.

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di wilayah non urban. Banyak desa yang tidak memiliki puskesmas atau rumah sakit yang lengkap dengan fasilitas dan tenaga medis yang cukup. Kondisi ini membuat masyarakat desa sulit untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Mereka sering kali harus melakukan perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jarak yang jauh dan biaya perjalanan menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, kurangnya tenaga medis yang tersedia di desa juga menjadi permasalahan yang signifikan. Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya cenderung lebih banyak berada di kota-kota besar, sehingga desa seringkali kekurangan tenaga medis yang berkualitas. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, keterbatasan tenaga medis juga mempengaruhi kualitas layanan kesehatan di desa, karena mereka tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perawatan yang efektif dan komprehensif.

Selanjutnya, masalah ekonomi juga berkontribusi terhadap akses layanan kesehatan yang terbatas di desa. Masyarakat desa

BAB TUJUH

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pendampingan desa merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penting bagi pendamping desa untuk memahami dan menerapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara efektif. Bab ini akan menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam konteks pendampingan desa untuk pengentasan kemiskinan.

Pertama-tama, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan faktor krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Desa-desa yang miskin sering kali mengandalkan sumber daya alam sebagai basis ekonomi utama mereka, seperti hasil hutan, perikanan, atau pertanian. Oleh karena itu, pendamping desa harus mendorong pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pendamping desa juga harus memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, sistem irigasi yang efisien, dan rotasi tanaman yang tepat. Selain itu, pendamping desa

BAB DELAPAN

Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

Pendampingan desa dalam konteks pengentasan kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Penguatan kelembagaan melibatkan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga desa, sedangkan partisipasi masyarakat menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Kedua aspek ini saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan desa menjadi landasan yang kokoh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kelembagaan yang kuat dan berfungsi dengan baik akan mendorong terciptanya tata kelola yang efektif dan transparan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Pendampingan desa memiliki peran penting dalam membantu mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang ada dalam struktur dan proses kelembagaan desa. Selanjutnya, pendampingan desa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah

BAB SEMBILAN

Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pendampingan Desa

Pendampingan desa adalah pendekatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa untuk mengatasi kemiskinan melalui pengembangan potensi lokal dan akses terhadap sumber daya. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai konsep evaluasi dan pengukuran dampak, metode-metode yang digunakan, serta tantangan dan manfaat yang terkait.

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi kinerja suatu program atau kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi. Dalam konteks pendampingan desa, evaluasi sangat penting dalam memahami sejauh mana pendampingan tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Evaluasi yang baik akan memberikan informasi yang objektif mengenai keberhasilan, hambatan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pendampingan desa. Hal ini memungkinkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat desa, dan pendamping desa, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Pengukuran dampak merupakan aspek penting dalam evaluasi pendampingan desa. Pengukuran dampak bertujuan untuk

DAFTAR **PUSTAKA**

- BPS. (2021). Kemiskinan di Indonesia: Hasil Pencapaian MDGs dan SDGs. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). Buku Panduan Pelaksanaan Program Pendampingan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta.
- World Bank. (2019). World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. World Bank, Washington, D.C.
- Sumner, A., & Tiwari, M. (Eds.). (2018). The Routledge Handbook of Poverty in Asia. Routledge, London.
- Lipton, M., & Ravallion, M. (1995). Poverty and Policy. Handbook of Development Economics, 3, 2551-2657.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th ed.). Pearson, Boston.
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2000). Voices of the Poor: Crying Out for Change. Oxford University Press, Oxford.
- Chambers, R. (1995). Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Environment and Urbanization, 7(1), 173-204.
- Hulme, D., & Shepherd, A. (2003). Conceptualizing Chronic Poverty. World Development, 31(3), 403-423.
- Uphoff, N. (1991). Sustainable Agriculture and Rural Development: A Global Perspective. World Development, 19(6), 607-616.

- UNDP. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations Development Programme, New York.
- World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. World Bank, Washington, D.C.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson, Boston.
- Government of India. (2018). *National Rural Livelihoods Mission: Framework for Implementation*. Ministry of Rural Development, New Delhi.
- FAO. (2019). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2019: Safeguarding Against Economic Slowdowns and Downturns*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Chambers, R. (1995). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*. Institute of Development Studies, Brighton.
- Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. Anchor Books, New York.
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251-274.
- Hickey, S., & du Toit, A. (Eds.). (2007). *Adapting to Change: The Challenge of Democracy, Citizenship and Inclusive Development*. UCT Press, Cape Town.
- McCord, A. (2014). The Importance of Theory in Evaluation: Insights from the Impact of Public Works Programmes in South Africa and Namibia. *Journal of Development Effectiveness*, 6(4), 371-393.
- World Health Organization. (2010). *Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies*. World Health Organization, Geneva.
- Mosley, P., Harrigan, J., & Toye, J. (1995). *Aid and Power: The World Bank and Policy-Based Lending* (Vol. 1). Routledge, London.

TENTANG PENULIS

Akhmad Munif Mubarak, anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir di pesisir selatan Kabupaten Jember. Setelah lulus Sekolah Dasar, hijrah ke Probolinggo untuk “nyantri” Di Pondok Pesantren Nurul Jadid hingga tamat SMA, dan melanjutkan studi S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Jember. Pernah Menjadi Field Staff PKBI Jember pada program pencegahan pekerja rumah tangga anak yang bekerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO), dan kemudian mengundurkan diri untuk melanjutkan studi pada program Pascasarjana *interdisciplinary islamic studies*, Konsentrasi Pekerjaan Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Pada tahun 2011.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan dalam jurnal Ilmiah seperti, “*Praktek Pekerja Sosial Komunitas Terhadap Pengrajin Bambu melalui Pengembangan Inovasi Pengelolaan Bambu*” terpublikasi pada Journal Of Social and Political Science (JSPS) 2017, “*The Public Trust Agriculture Biotechnology Product in The eastern Part Of east Java,, Indonesia: Discontent, is Acceptance and The Urge For Local Governance Regulations*” terpublikasi pada Kasetsart Journal Social Sciences, tahun 2018, “*Metode Penyembuhan Penderita Skizofrenia Oleh Mantri Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*” terpublikasi pada jurnal Empati, tahun 2018, “*Dataset knowledge, attitude, and trust of Indonesian selected public group toward agribiotechnology application*” terpublikasi pada jurnal Data in

Brief, tahun 2020. saat ini sedang menyiapkan naskah jurnal “*Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Media Sosial*” Dan “*Pandangan Masyarakat Desa Dan Model Penguatan Nilai Gotong Royong Untuk Pencegahan Stunting Di Desa*” tahun 2023.

Saat ini penulis aktif sebagai Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Jember, dan konsentrasi keilmuan yang menjadi minat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Email yang bisa dihubungi 760014660@mail.unej.ac.id

Joko Mulyono, merupakan dosen Universitas Jember. Ia menyelesaikan studi SI pada Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Jember dan S2 pada Prodi Sosiologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Joko memiliki minat pada isu-isu tentang pemberdayaan perempuan, Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Bencana. Pengalaman pendampingan masyarakat miskin melalui program P2KP yang menjilma menjadi PNPM-Mandiri Perkotaan dan hingga tahun 2023 pendampingan penanggulangan bencana pada program Destana.